



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**UNIT KERJA** : DINAS PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD AMIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 170566

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/230 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/35 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3162 m2/64 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/160 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/160 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 98.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA X1B02NO4L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 101.218.798



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.337.468.798
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.337.468.798

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.